

**PENUNDAAN MORATORIUM PENGIRIMAN TENAGA KERJA
INDONESIA KE TIONGKOK DALAM RANGKA MENGATASI
PERDAGANGAN ANAK BUAH KAPAL OLEH PEMERINTAH
INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN JOKOWI (2017-2021)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

Faizal Widyadhana Ardanto

19323209

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**PENUNDAAN MORATORIUM PENGIRIMAN TENAGA KERJA
INDONESIA KE TIONGKOK DALAM RANGKA MENGATASI
PERDAGANGAN ANAK BUAH KAPAL OLEH PEMERINTAH
INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN JOKOWI (2017-2021)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Faizal Widyadhana Ardanto

19323209

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PENUNDAAN MORATORIUM PENGIRIMAN TENAGA KERJA
INDONESIA KE TIONGKOK DALAM RANGKA MENGATASI
PERDAGANGAN ANAK BUAH KAPAL OLEH PEMERINTAH
INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN JOKOWI (2017-2021)**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.



Dewan Penguji

- 1 Gustris Eni Putri, S. IP., M. A.
- 2 Willi Ashadi, S.H.I., M. A.
- 3 Muhammad Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D.

Tanda Tangan

[Signature]
[Signature]
[Signature]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

18, Agustus 2023



Faizal Widyadhana Ardanto

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	1
ABSTRACT	1
BAB I3	
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Cakupan penelitian	9
1.5 Tinjauan Pustaka	10
1.6 Kerangka Pemikiran	13
1.7 Argumen Sementara	18
1.8 Metode Penelitian	19
1.8.1 Jenis Penelitian	19
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	19
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	19
1.8.4 Proses Penelitian	19
1.9 Sistematika Pembahasan	20
BAB II	21
Penerapan Penundaan Moratorium Untuk Mengatasi Perdagangan Manusia Yang Terjadi Pada ABK Indonesia Di Kapal Asing Tiongkok	21
2.1 Hubungan Pemerintah Indonesia Dan Pemerintah China Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia ABK Indonesia Di Kapal Asing Tiongkok	21
2.2. Penundaan Moratorium Untuk Mengatasi Perdagangan Manusia Yang Terjadi Pada ABK Indonesia Di Kapal Asing Tiongkok	25
BAB III	31
Konsep National Attributes and Foreign Policy Dalam Penundaan Moratorium Terhadap Kasus Yang Di Alami ABK Indonesia Di Kapal Asing Tiongkok	31
3.1. Ukuran Wilayah Negara Sebagai Dasar Penundaan Moratorium Terhadap Kasus ABK Indonesi DI Kapal Asing Tiongkok	31

3.2. Sumber Daya Alam Sebagai Dasar Penundaan Moratorium Terhadap Kasus ABK Indonesi DI Kapal Asing Tiongkok	33
3.3. Geografi Sebagai Dasar Penundaan Moratorium Terhadap Kasus ABK Indonesi DI Kapal Asing Tiongkok	36
3.4. Sistem Politik Sebagai Dasar Penundaan Moratorium Terhadap Kasus ABK Indonesi DI Kapal Asing Tiongkok	39
3.5. Kemampuan Militer Sebagai Dasar Penundaan Moratorium Terhadap Kasus ABK Indonesi DI Kapal Asing Tiongkok	40
3.6. Kemampuan Ekonomi Sebagai Dasar Penundaan Moratorium Terhadap Kasus ABK Indonesi DI Kapal Asing Tiongkok	42
BAB IV	46
PENUTUP	46
4.1. Kesimpulan	46
4.2. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48

ABSTRAK

Kejahatan kemanusiaan seperti perdagangan manusia dan kasus kekerasan sampai pada kehilangan nyawa yang terjadi terhadap para ABK (Anak Buah Kapal) Indonesia di tahun 2017 sampai pada tahun 2021, inilah mengapa pemerintah Indonesia di masa pak Joko Widodo mengeluarkan kebijakan moratorium untuk dapat melindungi para ABK Indonesia yang bererja di kapal China, tujuannya adalah untuk mengetahui peran kebijakan luar negeri Indonesia terhadap china dalam kebijakan moratorium yang dilakukan untuk melindungi para ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing China. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literature, adapun hasil penelitian penanganan dan pengawasan ABK merupakan bagian penting dari upaya peningkatan pelayanan dan keamanan bagi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri, dan berbagai perjanjian internasional lainnya yang mengikat kedua negara tersebut untuk menghormati dan mentaati agar dapat melindungi para ABK yang bekerja di atas kapal. Penundaan moratorium untuk mengatasi perdagangan manusia yang terjadi pada ABK Indonesia di kapal asing China, moratorium dilakukan untuk dapat merekonstruksikan sistem hukum terhadap pengiriman para ABK dan melindungi para ABK dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan diatas kapal asing China. Konsep *National Attributes and Foreign Policy* dalam penundaan moratorium terhadap kasus yang di alami ABK Indonesia di kapal asing China, terdapat 6 indikator yang mempengaruhi kebijakan moratorium dilakukan, ukuran wilayah, sumber daya alam, geografi, sistem politik, kekuatan militer, dan kekuatan ekonomi negara sebagai dasar penundaan moratorium terhadap kasus ABK Indonesia di kapal asing China, pada 6 indikator tersebut dengan konsep yang digagas oleh Hudson memberikan persetujuan bahwa moratorium terhadap ABK Indonesia yang bekerja dikapal asing China.

Kata Kunci : Kebijakan Luar Negeri, Moratorium, ABK Indonesia

ABSTRACT

Crimes against humanity such as human trafficking and cases of violence to the loss of life that occurred against Indonesian crew members (boarders) from 2017 to 2021, this is why the Indonesian government under Mr. Joko Widodo issued a moratorium policy to protect Indonesian crew members who working on Chinese ships, the goal is to know the role of Indonesia's foreign policy towards China in the moratorium policy carried out to protect Indonesian crew members who work on Chinese foreign ships. The research method used is qualitative research with data collection techniques that include literature studies, while the results of research on the handling and supervision of crew members are an important part of efforts to improve service and security for Indonesian Migrant Workers (TKI) abroad, and various other international agreements that bind the two. the country to respect and obey in order to protect the crew members who work on the ship. Postponement of the moratorium to deal with human trafficking that occurred in Indonesian crew members on Chinese foreign ships, the moratorium was carried out to be able to reconstitute the legal system for sending crew members and protect

crew members from crimes against humanity committed on board Chinese foreign ships. The concept of National Attributes and Foreign Policy in postponing a moratorium on cases experienced by Indonesian crew members on Chinese foreign ships, there are 6 indicators that influence the moratorium policy to be carried out, the size of the territory, natural resources, geography, political system, military strength, and the country's economic strength as a based on the postponement of the moratorium on cases of Indonesian crew members on Chinese foreign ships, on the 6 indicators with the concept initiated by Hudson giving approval that a moratorium on Indonesian crew members working on Chinese foreign ships.

Keywords: Foreign Policy, Moratorium, Indonesian crew members

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perikanan yang diikuti oleh industri perikanan memiliki rekam jejak yang sangat buruk. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan perdagangan manusia sering terjadi di industri perikanan. ABK asing diperlakukan tidak manusiawi di atas kapal penangkap ikan asing, khususnya kapal penangkap ikan China. Anggota staf Indonesia khususnya mengalami pelecehan fisik, pelecehan, dan menyajikan makanan dan minuman yang tidak sesuai. Pelanggaran umum, seperti perbudakan di kapal dan perdagangan, kemudian digabungkan dengan bahaya ini. Bahkan, beberapa upaya melawan pelanggaran HAM telah banyak didokumentasikan, terutama melalui liputan media (Kharismawan, 2021: 322-323).

Ikan merupakan sumber utama pendapatan bagi negara maritim, penangkapan ikan merupakan kegiatan utama dalam usaha penangkapan ikan. namun, bekerja dalam keadaan berbahaya. Sifat berisiko dari industri perikanan mempersulit regulator pemerintah dan organisasi yang mengelola kapal penangkap ikan untuk mengawasinya. Bahaya lainnya termasuk cuaca yang tidak dapat diprediksi dan jarak antar daerah penangkapan ikan. Jadwal anak buah kapal (ABK) tidak pasti, dan mereka bekerja selama kurang lebih 24 jam tanpa istirahat. Akibatnya, pekerja kru sering mengalami masalah kesehatan. tindakan sewenang-wenang yang sering dialami oleh anak buah kapal, termasuk penyiksaan, kerja paksa, pekerjaan tanpa istirahat yang layak, penyediaan makanan dan obat-obatan yang tidak memadai, dan pembayaran gaji yang terlambat, salah, atau tidak ada. Situasi ini menunjukkan bagaimana pengawas anak buah kapal tidak lagi

memandang mereka sebagai manusia melainkan sebagai hal yang dapat ditangani apa pun yang mereka pilih. (Ahriani, dkk, 2021: 53-55).

Sebagian besar anak buah kapal berasal dari negara-negara terbelakang seperti Myanmar, Thailand, dan Indonesia. Mereka adalah buruh migran, dan iming-iming penghasilan 450–1.000 dolar per bulan meyakinkan mereka untuk bergabung dengan kelompok tersebut (Ahriani, dkk, 2021: 53-55). Bekerja di kapal penangkap ikan merupakan alternatif bagi mereka karena minimnya penghasilan di tempat asal dan sulitnya mencari pekerjaan, terutama pekerjaan yang berkualitas. Para ABK memang memiliki kontrak dengan pengusaha sektor perikanan, namun seringkali kontrak tersebut hanya formalitas di atas kertas, dan banyak terjadi pelanggaran kontrak kerja (Lisandro & Olli, 2017).

Berkembangnya berbagai bisnis illegal fishing didorong oleh potensi industri perikanan yang besar. Bisnis haram inilah yang seringkali melanggar hukum, terutama yang berkaitan dengan hak asasi anak buah kapal. Keterpencilan zona operasional penangkapan ikan dari daratan menyulitkan aparat pemerintah untuk memantau jadwal kerja setiap kapal penangkap ikan. Pemanfaatan kapal, Kemudian, kapal jarak jauh atau armada penangkap ikan yang bisa beroperasi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sering ditambahkan. Insiden anggota kru menampilkan kerja paksa atau perbudakan di atas kapal selain perekrutan (Safitri, 2019).

Sebagai akibat dari kurangnya transparansi proses perekrutan dan seringnya kegagalan untuk memberikan informasi yang akurat, calon anggota kru seringkali tidak menyadari tugas yang akan mereka lakukan. Anak buah kapal biasanya menjadi korban perdagangan manusia sebelum mereka mulai bekerja. Menurut

IOM, KKP, dan Coventry University 2016, terdapat 833 kasus perdagangan manusia dan penyelundupan manusia selama prosedur perekrutan anak buah kapal antara tahun 2012 dan 2015 (*Indonesian Ocean Justice Initiative, 2020*).

Koneksi perdagangan global menjadi penyebab fenomena mobilitas tenaga kerja internasional di era globalisasi kontemporer. Ini dapat membuka prospek bisnis dan menarik tenaga kerja yang cukup besar. Persaingan internasional ini merangsang pasar untuk menciptakan peluang dan menarik karyawan dan profesional sesuai dengan bidang keahlian mereka. Meningkatnya permintaan tenaga kerja asing di pasar global diimbangi dengan pasokan yang tersedia, karena ada negara-negara berkembang yang mampu mengirimkan tenaga kerja ke sana dengan keuntungan ekonomi bahkan kondisi sosial sehingga calon tenaga kerja asing perlu bersedia pindah ke negara-negara yang dianggap memiliki prospek pekerjaan dan karir guna meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup (Ruhimat, 2018).

Keinginan arus migrasi tenaga kerja karena kondisi di berbagai negara, seperti negara maju, negara berkembang, dan negara miskin, akan menghasilkan tujuan pekerja yang memiliki tujuan mencari upah yang lebih tinggi dan taraf hidup yang lebih tinggi. Kondisi seperti itu menjadi faktor pendorong bagi pekerja untuk berpindah dari satu negara ke negara lain. Kesenjangan antara jumlah individu usia produktif dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia di Indonesia, negara dengan tingkat pengangguran tinggi dan penduduk miskin, mendorong angkatan kerja untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Pemerintah berencana mengirim TKI ke luar negeri sejak 1975 (Purwaka, 2013).

Pemerintah menggunakan strategi ini untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Buruh migran yang mayoritas adalah buruh kasar yang bekerja di sektor informal, seperti industri perikanan dan sektor lainnya, dan seiring berjalannya waktu, Ada sejumlah isu yang perlu ditangani oleh pemerintah untuk melindungi buruh migran. Reputasi negara Indonesia dapat dirusak oleh kejahatan internasional dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh apa yang disebut anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan asing (Prihanto 2012).

ABK Indonesia sering bertugas di kapal asing yang mengibarkan bendera China dan Taiwan. Daya pikat kompensasi yang tinggi dan praktik perdagangan manusia tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya jumlah ABK yang bekerja setiap tahunnya. Dari 2012 hingga 2015, hampir 200.000 anak buah kapal Indonesia dipekerjakan di kapal penangkap ikan berbendera asing. Banyak anak buah kapal yang tinggal, pulang, dan kemudian mengeluh. Menurut statistik yang diberikan, anak buah kapal non-prosedural atau anak buah kapal yang disewa melalui cara-cara terlarang, seperti penyelundupan, adalah pengadu utama. Keluhan yang paling umum biasanya tentang gaji yang tidak memadai, kondisi kerja yang kejam, tugas yang tidak sesuai untuk pelatihan seseorang, dan makanan yang tidak memadai (Suriyanto, 2021).

Beberapa insiden menonjol dan diliput oleh media, termasuk kasus budak dan penyelundupan Bejima. Kasus Bejima tampaknya menunjukkan fakta bahwa ada banyak pelanggaran yang terjadi saat ini. Menurut laporan investigasi Serikat Pekerja Migran Indonesia (SBMI) 2020, ada beberapa contoh seperti itu. Biasanya, insiden ini melibatkan kapal penangkap ikan yang mengibarkan bendera China,

seperti dalam kasus Fuan Yu, Han Tong, Han Rong, Lu Rong Yuan Yu, dan Zong Da. Hal ini kemudian didukung oleh pemberitaan terkini, seperti artikel BBC News tentang ABK Indonesia di kapal China: “Tidur hanya tiga jam, makan umpan ikan, hingga pengalaman pahit yang sulit dilupakan pelanggaran jenazah teman” dan Artikel Kompas.com Kasus ABK yang Meninggal di Kapal China Kembali Terjadi, Kapolri Diminta Bertindak (Nasution, 2017).

Ironisnya, ABK Indonesia dijadikan budak di kapal penangkap ikan, terutama yang berbendera China. Terlepas dari kenyataan bahwa perbudakan telah dilarang sejak akhir abad ke-19, masih banyak anak buah kapal Indonesia yang menanggungnya. Hal ini memaksa pemerintah Indonesia untuk menunda moratorium pengiriman TKI ke China guna mengatasi perdagangan ABK yang dilakukan pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi. Pemerintah Indonesia terpaksa menunda moratorium pengiriman TKI ke China sebagai bentuk respon pemerintah Indonesia, khususnya dalam menegakkan aturan terkait pemberantasan perbudakan yang mengacu pada peraturan pemerintah yang ada dan konvensi internasional (2017-2021) (Prinasari, 2019).

Keputusan pemerintah untuk menunda inilah yang disebut dengan moratorium. Berdasarkan landasan hukum UU 30/2014 dan kemudian membahas sumber kewenangan pemerintahan. Setiap lembaga yang menangani urusan pemerintah diharuskan untuk bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan aturan yang relevan. Pemerintah secara teoritis memperoleh kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan tersebut melalui atribusi, delegasi, dan mandat (Andryan, 2022).

Meski sudah ada aturan dan pemeriksaan, hanya beberapa kasus yang benar-benar sudah ditangani. Pemerintah juga cenderung hanya menanggapi isu-isu yang sudah muncul dan mendapat perhatian publik; tidak ada langkah proaktif yang diambil untuk memerangi perdagangan manusia atau perbudakan di atas kapal penangkap ikan, juga tidak ada upaya kerja sama yang dilakukan dengan negara asal nelayan. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah Indonesia untuk menunda pelarangan pengiriman TKI ke China dalam rangka memerangi perdagangan ABK pada masa pemerintahan Jokowi (2017–2021). Dalam kurun waktu 2017-2021 terdapat kasus yang menjadi perhatian pemerintah, salah satunya kasus dua anak buah kapal yang lompat kelaut karena mereka tidak kuat dengan sistem kerja yang diberikan oleh kapal China serta tidak sesuai dengan perjanjian yang diberikan.

1.2 Rumusan Masalah

Perdagangan manusia dan kejahatan transnasional lainnya telah terjadi di seluruh dunia, namun penulis makalah ini ingin berkonsentrasi pada insiden yang terjadi di kapal asing China saat pemerintahan Jokowi berkuasa. Mengapa Indonesia melakukan penunandaan Moratorium pada pengiriman ABK Di Kapal Asing China Pada Masa Pemerintahan Jokowi (2017-2021).

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks dan ungkapan masalah di atas, yang menunjukkan bahwa meskipun Cina dan Indonesia telah bekerja sama cukup lama, kesulitan masing-masing berbeda, penulis ingin tahu dan ingin menjelaskan tujuan penelitian, yang meliputi:

1. Mengetahui sikap Indonesia terutama pada masa pemerintahan Jokowi (2017-2021) terhadap permasalahan Human Trafficking yang terjadi di kapal berbendera China.
2. Mengetahui hukum yang ditegakkan terhadap Human Trafficking Indonesia.
3. Mengetahui bagaimana dampak kerjasama antara Indonesia dan China setelah adanya permasalahan perdagangan ABK pada kapal China.

1.4 Cakupan penelitian

Penulis dalam penelitian kali ini ingin mengetahui seberapa dekat hubungan antara Indonesia dan China dalam Gelombang permintaan yang luas dari kapal asing China untuk anak buah kapal dalam bisnis industri perikanan pada tahun 2017 menyebabkan kerja sama antara perusahaan pelayaran perikanan dari China dengan bisnis atau agen pekerja migran Indonesia, terutama yang bekerja di kapal, pada periode 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017 sampai dengan 2021 banyak dan kerap terjadi kekerasan atau kejahatan kemanusiaan bahkan sampai kehilangan nyawa terhadap ABK asal Indonesia di kapal asing China, pada tahun 2017 sampai pada tahun 2021 praktik pengiriman para ABK Indonesia kerap dilakukan oleh berbagai perusahaan illegal yang memberikan fasilitas pengiriman ABK ke kapal asing China. Penulis penelitian ini ingin mengetahui seberapa erat hubungan Indonesia dan China pada masa pemerintahan Jokowi.

Dari segi perspektif, penulis berusaha untuk memahami bagaimana menyelesaikan masalah ini dari sudut pandang Indonesia karena kita dapat membuktikan sendiri bahwa Indonesia dan China adalah mitra bisnis lama. Penulis ingin berkonsentrasi pada periode antara tahun 2017 dan 2021, yaitu antara

berakhirnya jabatan pertama Presiden Joko Widodo dan dimulainya jabatan kedua Presiden Joko Widodo, guna mencapai hasil yang sebesar-besarnya dan sedekat mungkin dengan insiden terakhir yang melibatkan anak buah kapal Indonesia. Pada tahun 2017 terdapat 1.200 kasus yang dialami oleh anak buah kapal, 2018 terdapat 1.200 kasus serta 2019 terdapat 1.095 kasus kekerasan yang dihadapi oleh anak buah kapal asal Indonesia yang menjadi pelanggaran HAM oleh kapal asing China (Chaterine, 2020). Kasus dua anak buah kapal yang lompat ke laut dari kapal asing China menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020, para pekerja diberikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati serta gaji yang jauh dibawah perjanjian pada awal kontrak kerja. Anak buah kapal yang bekerja pada kapal Lu Qing Yuan Yu 901 bertahan selama kurang lebih tujuh jam ditengah laut dengan mengambang, mereka pada awalnya dijanjikan bekerja di Korea Selatan akan tetapi justru dipekerjakan di kapal asing China dengan kesepakatan yang sangat berbeda serta menjadi salah satu objek pelanggaran HAM (Wiyoga, 2020).

1.5 Tinjauan Pustaka

Perbudakan dan perdagangan manusia telah dibahas dalam sejumlah penelitian sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Studi-studi ini dapat menawarkan sumber informasi dan data analitis untuk mengidentifikasi kebutuhan penelitian. Riset pertama Daniel Surianto yang ditujukan untuk ABK, dalam jurnal Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Nasional, dirilis pada 2021. Riset ini menjelaskan mengapa banyak ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing. Peningkatan ukuran awak disebabkan oleh peningkatan permintaan hasil ikan dari populasi umum (Surianto, 2021). Tingginya

volume pertanyaan berdampak pada meningkatnya jumlah anak buah kapal yang dipekerjakan oleh pemasok tenaga kerja yang sah dan tidak sah. Sayangnya, akibat eksploitasi yang berujung pada perbudakan, status anak buah kapal terkadang agak genting. Namun karena anak buah kapal tidak dilindungi secara hukum, maka penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi anak buah kapal. Demikian penelitian ini melakukan studi menguraikan situasi anak buah kapal dan bagaimana pemerintah Indonesia melindungi mereka di bawah kerangka hukum yang ditetapkan serta kerjasama yang telah dibentuk antara Indonesia dan China.

Situasi dan persoalan di ABK tentu saja akan rumit, apalagi negara dan pemerintah terlibat. Meski kemampuan negara untuk melindungi dinilai kurang, namun kondisi ABK memprihatinkan. Kewajiban Negara Bendera Terhadap Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Long Xing 629 China: Eksploitasi Awak Asing. Jurnal kajian ditulis oleh Yudi Dharmawan, Bernard Sipahutar dan Mochammad Farisi pada tahun 2022 . Studi ini menunjukkan bahwa para ABK Indonesia di kapal-kapal China mengalami eksploitasi, diskriminasi, dan perbudakan. Tentu saja, perlakuan seperti itu bertentangan dengan hak asasi manusia (Farisi, Sipahutar, Dharmawan 2022). Anak buah kapal dilindungi secara hukum di bawah hukum domestik dan asing. Selain melindungi anak buah kapal, hukum internasional juga mengatur bagaimana negara bendera asal kapal dapat dipertanggung jawabkan. Namun pada kenyataannya penelitian ini belum menunjukkan bagaimana negara bendera kapal Long Xing 629 dalam hal ini China telah menyadari atau mengambil tindakan apapun untuk mengatasi isu perbudakan ABK Indonesia. Demikian pada penelitian ini menawarkan referensi tentang kewajiban pemerintah dalam

menangani masalah perbudakan anak buah kapal supaya mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Anak buah kapal juga disewa oleh pedagang yang tidak baik, masalah perbudakan di antara anak buah kapal terkait dengan masalah perdagangan manusia. Hal itu diulas dalam jurnal Gusrika Safitri tahun 2019 berjudul *Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Perikanan Taiwan*. Studi ini menemukan bahwa terdapat permasalahan yang menyebabkan kesulitan dalam mengatur anak buah kapal dari negara bendera kapal (Safitri 2019). Masalah tersebut disebabkan oleh perekrutan anak buah kapal di luar sistem hukum; jelas, baik pemerintah Indonesia maupun Taiwan tidak mengakui pemasok ilegal ini sebagai pemasok yang sah. Pemerintah China percaya bahwa masalah anak buah kapal yang bukan dari penyedia yang sah bukanlah masalah mereka, melainkan masalah kapal yang bersangkutan dan penyedia layanan itu sendiri. Namun penanganan kasus anak buah kapal tentu menjadi tantangan berat bagi pemerintah Indonesia. Demikian studi ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melihat bagaimana pemerintah Indonesia menangani situasi yang melibatkan anak buah kapal yang dipekerjakan secara ilegal.

Perbudakan Anggota Kapal Perikanan Asing di Indonesia (2017), jurnal yang diproduksi oleh Muhammad Dwibagus Lisandro & Mohammad Irvan Olii, memuat penelitian tentang perbudakan. Studi ini menunjukkan bahwa mempekerjakan tenaga kerja bergaji rendah diperlukan untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan bagi pemilik kapal penangkap ikan. Banyak anak buah kapal dan karyawan yang terlilit hutang, sehingga mudah untuk mengelabui mereka agar melakukan kerja paksa di atas kapal (Olii, Lisandro 2017).

Karena tidak mendapat upah, ABK yang melakukan kerja paksa dianggap termasuk dalam jenis perbudakan, Menempatkan anggota kru di penjara dan bekerja keras berjam-jam. Makanan yang mereka makan dan aksesibilitas layanan medis hanyalah dua contoh betapa tidak sehatnya lingkungan kerja. Namun fakta dari kebutuhan akan tenaga kerja murah menormalkan perbudakan anggota kru, membuatnya tampak wajar. Demikian penelitian ini ingin mengetahui inisiatif pemerintah Indonesia untuk menghentikan perbudakan anak buah kapal guna melindungi serta menghindari adanya pelanggaran HAM.

1.6 Kerangka Pemikiran

Hipotesis Valerie M. Hudson digunakan dalam penelitian ini. Penulis Analisis Kebijakan Luar Negeri: Teori Klasik dan Kontemporer, Edisi Kedua, memperkenalkan gagasan Atribut Nasional dan Kebijakan Luar Negeri, yang berpendapat bahwa karakteristik negara-bangsa dapat mempengaruhi jalannya politik luar negeri (Hudson, 2016).

Saat mengambil keputusan, ide ini harus mempertimbangkan aspek internal dan eksternal. Pilihan bangsa dalam merumuskan kebijakan luar negeri akan dibentuk oleh interaksi antara variabel internal dan eksternal. Sementara faktor internal lebih menekankan pada hubungan antara masyarakat dan negara, variabel eksternal lebih menekankan pada kerangka internasional, termasuk hubungan dengan negara lain dan situasi global (Matondang, 2021).

Landasan pembentukan politik luar negeri adalah ciri-ciri kebangsaan. Kebijakan luar negeri dibuat untuk melayani kepentingan nasional. Kebijakan pemerintah berdampak pada prospek ekonomi, nilai dan budaya warga, serta keselamatan dan keamanan. Kebijakan luar negeri terkadang memengaruhi

pengejaran kepentingan nasional, sedangkan pengejaran kepentingan nasional memengaruhi kebijakan luar negeri. Keputusan tentang kebijakan luar negeri mungkin memiliki efek langsung atau jangka panjang (Matondang, 2021).

Karakteristik negara-bangsa berdampak signifikan terhadap arah strategi internasional, enam indikator yang dirancang oleh Valerie M. Hudson adalah ukuran negara, sumber daya alam, geografi, sistem politik, kekuatan militer, dan kekuatan ekonomi. Total ada enam indikasi.

1. Ukuran Wilayah Negara

Ukuran wilayah suatu negara dapat berdampak pada tujuan dan metode pengambilan keputusannya. Misalnya, kebijakan luar negeri negara kecil dapat menemukan kerja sama dengan tetangga besar yang menarik. Tentu saja, kenetralan mungkin tampak lebih baik jika sebuah negara kecil terlibat dalam konflik antara dua negara besar (Hudson, 2016).

Indikator ini digunakan dalam melihat kekuatan Indonesia melalui ukuran wilayah yang digunakan dalam melihat keadaan dari Indonesia dan Cina, Indonesia sebagai negara berkembang dan Cina sebagai negara maju menempatkan Indonesia sebagai negara yang dihadapkan pada asa kenetralitasan jika kemudian terjadi konflik antara negara besar yakni Cina dan Amerika Serikat yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan perihal Moratorium pengiriman anak buah kapal Indonesia ke kapa lasing China.

2. Sumber Daya Alam

Kebijakan luar negeri juga dapat dipengaruhi oleh sumber daya alam. Sumber daya alam, misalnya, memainkan peran penting karena dibutuhkan oleh negara-

negara besar namun dikuasai oleh negara-negara kecil untuk kebutuhan energinya (Hudson, 2016).

Potensi sumber daya alam Indonesia yang begitu besar terhadap negara China baik dalam segi kebutuhan energi dan kebutuhan uranium untuk kebutuhan nuklir sebagaimana kebutuhan negara besar pada umumnya kedudukan Indonesia sebagai salah satu penyokong energi yang sangat perlu dan dibutuhkan. Maka dengan demikian pada kasus kejahatan kemanusiaan atas perdagangan manusia dan kejahatan kemanusiaan lainnya yang terjadi di atas kapal lasing China, Indonesia dapat mengambil kebijakan luar negeri terhadap China dengan faktor tersebut.

3. Geografi

Kebijakan luar negeri juga dapat dipengaruhi oleh kekhasan geografis. Geografi tidak diragukan lagi mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam. Elemen geografi yang sangat penting untuk hubungan internasional adalah akses dari suatu lokasi serta ke pelabuhan, saluran air, dan fitur geografis yang signifikan secara strategis (Hudson, 2016).

Lokasi Indonesia yang begitu strategis yang diapit oleh dua samudera hindia dan pasifik memberikan keuntungan Indonesia terhadap China dalam mempertahankan keamanan negaranya dengan memanfaatkan Indonesia sebagai negara yang dapat mendukung China apabila China dihadapkan oleh perang di wilayah perairan tersebut. Maka hal ini Indonesia dapat mengambil kebijakan moratorium untuk mencegah dan melindungi para anak buah kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal lasing China tersebut.

4. Sistem Politik

Kebijakan luar negeri dapat dipengaruhi oleh sifat sistem politik di negara-bangsa. Negara demokrasi sering kali tidak melawan negara demokrasi lain, yang merupakan salah satu dari sedikit keteraturan yang dicatat oleh hubungan internasional (Hudson, 2016). Indonesia menganut sistem politik Presidential sejak tahun 1998 yang menjadikan Indonesia negara demokrasi.

Pada dasarnya sistem politik Indonesia dan china berbeda Indonesia dengan system politik demokrasi sedangkan china dengan system politik komunis namun dalam sejarahnya Indonesia memiliki hubungan politik yang baik melauli *founding father* kita yakni bapak Ir. Soekarno yang akhirnya hubungan politik antara Indonesia dan china memiliki sejarah poltik yang baik sehingga demikian Indonesia dalam rangka menerapkan kebijakan moratorium dapat dilakukan untuk dapat melindungi para anak buah kapal dari praktik kejahatan kemanusiaan yang dilakukan diatas kapal China.

5. Kemampuan Militer

Tingkat kehebatan militer negara-bangsa adalah kualitas nasional penting yang jelas mempengaruhi kebijakan luar negerinya. Sentimen kebijakan luar negeri seringkali dapat dihasilkan dari keunggulan senjata. Menurut Globalfirepower.com, Indonesia memiliki militer terkuat ke-16 di dunia. China memiliki kekuatan militer terkuat ketiga di dunia secara keseluruhan (Bertrand Russell, 2021).

Kemampuan militer kedua negara memiliki keunggulannya masing – masing China berada di urutan ke-3 sedangkan Indonesia dengan kekuatan militer ke 16 didunia sangat berpengaruh dalam menjaga kedaulatan negaranya dengan memiliki hubungan yang baik antara kedua negara tersebut. China sangat membutuhkan personil dan armada serta fasilitas bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia

sebagai pelapis kekuatan militer jika China menghadapi masalah maupun pertempuran terhadap negara yang ingin berperang terhadap China. Maka dengan alasan inilah kekuatan militer menjadikan indikator Indonesia dalam hal mengeluarkan kebijakan moratorium dalam melindungi warga Indonesia yakni para anak buah kapal yang mengalami peristiwa kejahatan kemanusiaan di atas kapal China. Akan tetapi Indonesia dalam hal ini masih kesulitan untuk melakukan moratorium karena masih berketergantungan dengan China sebagai pemilik kekuatan militer yang berada jauh di atas Indonesia untuk menghindari konflik serta pemberhentian Kerjasama.

6. Kemampuan Ekonomi

Pola ketergantungan ekonomi dan saling ketergantungan harus diselidiki untuk memahami dampak kekuatan ekonomi pada kebijakan luar negeri, dengan mempertimbangkan kekayaan relatif suatu bangsa sebagai variabel dalam menafsirkan perilaku mereka. Indikator-indikator tersebut menunjukkan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menyusun rencana pelaksanaan politik luar negeri yang dapat menguntungkan bangsa dan hubungan internasional yang terjalin antara bangsa-bangsa dengan Indonesia. Oleh karena itu, wajar jika enam indikasi di atas dapat dijadikan contoh oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan situasi yang berulang kali muncul ketika pemerintah Indonesia melakukan perdagangan ABK pada tahun 2017 hingga 2021 (Hudson, 2016).

Upaya pemerintah mengeluarkan kebijakan luar negeri penundaan moratorium pengiriman TKI ke China dalam rangka memerangi perdagangan ABK yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak terlepas dari tolok ukur yang digunakan sebagai indikator yang telah dibahas di atas. Alasan penundaan ini dijadikan acuan

untuk mengukur strategi dan dampak kebijakan tentang hubungan antara pemerintah Cina dan Indonesia. Penundaan keputusan moratorium ini juga menjadi pencegah terjadinya kegaduhan dalam negeri karena China termasuk negara yang kuat bagi negara Indonesia.

1.7 Argumen Sementara

Mencakup beberapa sub kasus, antara lain perbudakan, kerja paksa, dan perdagangan manusia, kasus ABK di Indonesia menjadi rumit. ABK Indonesia harus melalui skenario yang sama pada tahun 2020, yaitu, secara keliru dilabeli sebagai karyawan di kapal penangkap ikan China. Sebanyak 22 ABK WNI berada di kapal ikan Long Xing 629, dan menurut informasi Kementerian Luar Negeri, 22 orang di antaranya dilaporkan telah disiksa. ABK Cina sering menuntut dan memaksa ABK Indonesia untuk bekerja lebih lama. ABK Indonesia akan menanggung hukuman berat, seperti ditendang, jika pekerjaannya tidak sesuai dengan harapan ABK China. ABK WNI juga kurang tidur, dan jika ketahuan akan dihukum berat, termasuk dipukul di kepala (Kompas 2020).

Peneliti berpendapat bahwa isu perdagangan manusia saat ini merupakan salah satu isu keamanan manusia, dan bahwa negara dan pemerintah harus mengambil tindakan dengan bekerja sama dengan China untuk menyelesaikannya. Karena kurangnya komitmen pemerintah untuk memberantas perdagangan manusia sebagai anak buah kapal selama ini, peneliti berkonsentrasi pada upaya Indonesia untuk memberantas praktik tersebut. Pada kenyataannya, salah satu area konsentrasi keamanan manusia adalah situasi perdagangan manusia.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Sebuah pendekatan penelitian kualitatif diadopsi untuk penelitian ini. Karena mereka berkaitan dengan percakapan tentang fenomena sosial dan kejadian atau peristiwa yang memiliki dampak sosial tertentu, metodologi penelitian kualitatif diterapkan. Teknik kualitatif adalah cara memandang kehidupan atau interaksi yang terjadi antar manusia atau antar kelompok manusia.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Individualitas dan variasi dari setiap perilaku, pendekatan kualitatif digunakan untuk mempelajari pola perilaku manusia yang tidak dapat direkam atau diukur secara kuantitatif. Dengan tujuan memberikan penjelasan, metode penelitian kualitatif mendorong seorang peneliti untuk lebih terlibat dan mampu memahami topik yang sedang diteliti pada tingkat yang lebih dalam.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan sumber dan pelaksanaan penelitian, penelitian ini menggunakan metodologi studi literatur. mengambil informasi dari sumber tekstual yang ada, seperti berita, statistik, dan undang-undang. Jurnal dan penelitian terkait sering digunakan oleh peneliti sebagai alat analisis.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses pengumpulan sumber dan pelaksanaan penelitian, penelitian ini menggunakan metodologi studi literatur. mengambil informasi dari sumber tekstual yang ada, seperti berita, statistik, dan undang-undang. Jurnal dan

penelitian terkait sering digunakan oleh peneliti sebagai alat analisis (Nursapia, 2020).

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab- dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB Pertama Informasi latar belakang yang memberikan gambaran dasar tentang permasalahan ABK dan keterlibatan minimal pemerintah disajikan pada bab pertama. Pembingkaiian masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan literatur yang digunakan sebagai sumber analisis semuanya tercakup dalam bab ini. Bab ini juga menjelaskan tentang Kerangka Konseptual yang menjadi landasan pemikiran.

BAB Kedua berisi penjelasan lebih rinci mengenai penerapan penundaan moratorium terhadap-kasus ABK khususnya dalam mengatasi perdagangan manusia yang dialami oleh ABK Indonesia di kapal asing China.

BAB Ketiga berisi penjelasan lebih mendalam mengenai Konsep National Attributes and Foreign Policy, yang dihadapkan pada penundaan moratorium terhadap-kasus ABK khususnya dalam hal mengatasi perdagangan manusia yang dialami oleh ABK Indonesia di kapal asing China.

BAB Keempat merupakan kesimpulan dan saran dari pembahasan.

BAB II

Penerapan Penundaan Moratorium Untuk Mengatasi Perdagangan Manusia Yang Terjadi Pada ABK Indonesia Di Kapal Asing Tiongkok

2.1 Hubungan Pemerintah Indonesia Dan Pemerintah China Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia ABK Indonesia Di Kapal Asing Tiongkok

Pada 13 April 1950, hubungan diplomatik Indonesia dan China terjalin, hubungan diplomatik ini kini telah mencapai tahun ke-70. Selama 70 tahun proses mengikat persahabatan antar bangsa, banyak kendala yang berhasil diatasi dan dapat diselesaikan bersama. China dan Indonesia, dua anggota utama G-20 dan tetangga Asia dengan ciri sosiokultural, politik, dan pemerintahan mereka sendiri yang berbeda, telah menunjukkan kepada dunia nilai kerjasama, sinergi, dan persatuan internasional (Firdaus, 2021).

Babak baru kerjasama sektor kelautan dan perikanan antara China dan Indonesia telah dimulai. Dalam rangka mendukung pembangunan perekonomian kedua negara dan menjunjung tinggi kelestarian ekosistem laut yang sejalan dengan prinsip ekonomi biru, Kementerian Sumber Daya Alam China dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia telah memutuskan untuk melanjutkan kerja sama maritim mereka. Dokumen Implementing Arrangement (IA) yang ditandatangani secara virtual oleh Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, dan Wang Guanghua, Menteri Sumber Daya Alam China, di Beijing dan Jakarta, merinci kerja sama ini. Pengelolaan pesisir terpadu, mitigasi, dan adaptasi di pesisir dan pulau-pulau kecil hanyalah beberapa bidang teknis yang tercakup dalam kerja sama kedua negara di sektor maritim.

Selain itu, kolaborasi dalam pengembangan ekonomi biru dan kolaborasi dalam meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia (Owo, 2023).

Sebagai bagian dari bentuk kerja sama yang disepakati bersama, berbagi informasi di sektor kelautan, kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas dan pertukaran pengetahuan, seperti layanan dan pendidikan kejuruan, simposium bersama, seminar, lokakarya, pelatihan, dan pertukaran pakar. Babak baru dalam kerja sama maritim kedua negara telah dimulai dengan penandatanganan kontrak Pengaturan Pelaksana antara KKP dan Kementerian Sumber Daya Alam China (Firdaus, 2021).

Kedua negara sekarang berbicara tentang memperbarui kolaborasi mereka yang sudah ada di industri perikanan. Sementara itu, hubungan perdagangan produk perikanan kedua negara terjalin erat. Pada periode 2018 hingga 2022, neraca perdagangan produk perikanan Indonesia dengan China masih surplus. Pada semester I 2022, barang perikanan Indonesia memiliki nilai ekspor USD 485 juta dan nilai impor USD 56 juta. Anda mungkin tertarik untuk mengetahui bahwa pada tanggal 5 Juni 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Anggota Dewan Negara yang juga Menteri Luar Negeri China menandatangani MoU Penguatan Kerjasama Maritim antara Pemerintah Indonesia dan China. Ini perjanjian meliputi bidang ekonomi, perdagangan, kerjasama politik, keamanan, dan pertahanan. Penghapusan IUU Fishing, kerjasama budidaya, pengolahan hasil perikanan, cold storage, dan pemasaran, serta kerjasama alih teknologi dan keahlian, semuanya termasuk dalam kerjasama kelautan. Penanganan dan pengawasan ABK (ABK dan ATN) merupakan bagian penting dari upaya peningkatan pelayanan dan keamanan bagi TKI di luar negeri. Data penempatan

pekerja migran asal Indonesia dikelola oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI) (Erman Suparno, 2019).

Sekitar 350 ABK Indonesia bekerja sebagai nelayan di kapal asing China, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan. Karena tidak ada sistem perlindungan yang lengkap, para anak buah kapal penangkap ikan ini rentan terhadap praktik perbudakan. Meskipun demikian, sangat penting untuk memperkuat perlindungan bagi anak buah kapal penangkap ikan Indonesia. Menurut temuan wawancara, ada sekitar 300 anak buah kapal, banyak di antaranya bekerja sebagai penangkap ikan anak buah kapal di kawasan Selandia Baru dengan kondisi kerja yang berbahaya. 3 Anggota anak buah kapal penangkap ikan ini sering mengalami penganiayaan fisik dan perlakuan tidak manusiawi, diperbudak oleh Hutang, dan bekerja secara bergilir antara 16 dan 53 jam dengan upah rata-rata masing-masing 49 sen. Pada tahun 2018, 155 ABK WNI di Pelabuhan Spanyol, Trinidad dan Tobago yang ditinggalkan oleh bisnis kapal penangkap ikan China juga mengalami perilaku serupa. Masuk akal jika penanganan masalah yang melibatkan pelaut Indonesia di kapal asing di perairan asing berbeda dengan penanganan kasus yang melibatkan pekerja migran lain dari Indonesia (Owo, 2023).

Hukum internasional, yaitu United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Protokolnya, mengatur kerjasama antara pemerintah Indonesia dan China untuk melarang dan menghentikan perdagangan tenaga kerja di usaha penangkapan ikan. Konvensi ILO 185, Konvensi Dokumen Identitas Pelaut, 188, Konvensi dan Rekomendasi Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (No. 199), 98, Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama, Konvensi Buruh Maritim (MLC) ILO 2006, dan lain-lain. IMO

Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 1973, IMO Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974, dan IMO STCW 1978 (Standar untuk Pelatihan, Sertifikasi, dan Pengawasan Pelaut) dan Protokol 1997 (United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, 2000).

73 hingga 187 anggota ILO telah meratifikasi MLC, yang mulai berlaku pada tahun 2013, dan berupaya memberikan jaminan sosial, hak kerja, dan pekerjaan yang adil atau tanpa diskriminasi. Namun, MLC secara definitif mengecualikan pengaturan anak buah kapal di kapal penangkap ikan karena kerumitan masalah tersebut; ini bukan soal bisnis atau cari untung tapi soal kemanusiaan, itu yang terpenting Peraturan mengenai usia minimum untuk bekerja di kapal penangkap ikan, menjaga dalam melakukan aktivitas yang terjadi di atas kapal pada malam hari, penerbitan surat keterangan kesehatan bagi anak buah kapal dalam menjaga perjanjian dengan pelaut Indonesia, dan lain-lain membuat pada tahun 2016 hanya ada 7 negara dari 187 anggota ILO yang menyetujui dan menegakkan instrumen tersebut, sehingga aturan tersebut tidak mungkin diberlakukan (Erman Suparno, 2019).

Memperlihatkan bahwa banyaknya masalah perihal aturan terkait para ABK kapal dan juga rendahnya kepercayaan atas komitmen politis negara- negara yang bersangkutan sebagai bentuk dari suatu wilayah penangkapan ikan di dunia, terdapat kawasan di negara asia pasifik yang menyetujui dan memberlakukan ILO C188, Otoritas yang mengatur dan mengatur penangkapan ikan dan awak perikanan STCW, yang kemudian menentukan sertifikasi, standar pelatihan minimum, dan pemantauan keselamatan anggota awak yang melakukan operasi di atas kapal, seringkali diabaikan oleh negara-negara maju. Alat ini diharapkan dapat

meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelatihan dan kemampuan anak buah kapal guna menjamin keselamatan kerja mereka di bidang perikanan selama menjalankan tugas tersebut. Selain itu, STCW-F menentukan bagaimana melakukan penyelidikan dan langkah apa yang harus diambil untuk menghukum individu yang melanggar norma ini. Perjanjian ini diratifikasi oleh 170 anggota Organisasi Maritim Internasional (IMO) pada tahun 2012 dan mulai berlaku. (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 2021).

Dari instrument tersebut menjadikan hubungan Indonesia dan China untuk kemudian patuh dan taat pada hukum internasional sebagaimana kedua negara tersebut yang masuk dalam zona kawasan tersebut sehingga perlu kemudian kasus penanganan terhadap perdagangan manusia yang terjadi pada para ABK kapal di kapal asing China menjadi perhatian lebih dalam menjaga keharmonisan antara kedua negara tersebut dalam meningkatkan kerjasama dalam bidang perikanan.

2.2. Penundaan Moratorium Untuk Mengatasi Perdagangan Manusia Yang Terjadi Pada ABK Indonesia Di Kapal Asing Tiongkok

Moratorium dimaknai sebagai penundaan atau penangguhan. bahwa moratorium merupakan bentuk tindakan dari pemerintah untuk melakukan penundaan. Ini akan dihasilkan dari cara di mana pemerintah akan beroperasi di bawah UU 30/2014. Setiap lembaga yang menangani urusan pemerintah diharuskan untuk bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan aturan yang relevan. Secara teoritis, atribusi, delegasi, dan mandat adalah bagaimana pemerintah memperoleh kekuasaan yang berasal dari peraturan

perundang-undangan. Selain itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan (Ajb Rakhmawanto, 2019).

Pemerintah kemudian mengambil tindakan dengan menetapkan kebijakan yang menunda moratorium. Pelaut harus beroperasi dalam batas yang sangat kecil di kapal China karena berbagai masalah yang melibatkan anak buah kapal. Menurut aturan, mereka hanya diperbolehkan bekerja di kapal maksimal 12 bulan karena kondisi mental ABK WNI yang terbukti stres selama setahun di laut dan kemampuan kapal yang tidak mendukung. Saat ini ada sekitar 400.000 orang yang telah bekerja selama lebih dari setahun dalam keadaan yang ada. Akibatnya, pasti ada banyak ketegangan karena menjadi gaduh, terutama di kapal nelayan yang kerap didera ABK Indonesia karena keterbatasan sudut pandang. Mereka pasti stres dan harus rapat setiap hari selama beberapa bulan. Karena itu, pemerintah mendesak agar tidak ada pembatasan ABK WNI melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Anak buah kapal Indonesia sering dipekerjakan di kapal asing China, dan pemerintah masih dalam pembicaraan dengan China untuk memperbaiki kondisi (Anjani, 2022).

Catatan organisasi Destructive Fishing Watch (DFW) menunjukkan peristiwa Long Xing 629 bukan pertama kalinya ABK Indonesia mengalami hal yang tidak diinginkan. Angka DFW menunjukkan bahwa antara November 2019 dan Mei 2020, setidaknya sembilan anak buah kapal Indonesia dilaporkan hilang atau tewas. TKI di kapal asing. Seorang anak buah kapal Indonesia di atas kapal China bernama Long Xing 629 bersaksi atas nama mereka dan menggambarkan kondisi kerja yang menantang di kapal China tersebut. Tekanan yang sama juga

diungkapkan beberapa anggota DPR. Menanggapi desakan tersebut, Zulficar Mochtar, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengatakan pihaknya sedang memikirkan untuk memberlakukan larangan mempekerjakan ABK WNI untuk bekerja di kapal penangkap ikan asing (Destructive Fishing Watch Indonesia, 2021).

Selama enam bulan ke depan, moratorium akan dilaksanakan untuk melaksanakan beberapa reformasi yang akan membuat pengelolaan pekerja migran jauh lebih efektif ke depan, memberikan perlakuan dan hak yang lebih baik bagi ABK melalui sistem saluran tunggal yang dicatat dan dipantau dengan cermat. BBC masih menunggu jawaban setelah menanyakan posisi Kedutaan Besar China di Jakarta terkait pembahasan moratorium tersebut. Asosiasi Nelayan Indonesia Fisherman Manning Agents Association (IFMA) menyatakan sangat malu atas seringnya terjadi pelecehan dan penelantaran ABK Indonesia. anggota di tengah laut (Aspataki, 2020).

Menurut Wakil Ketua IFMA, Tikno, beberapa agen membubarkan ABK yang tidak memiliki pekerjaan terpisah dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Tenaga Kerja. Sebagian besar dari mereka pernah dipekerjakan sebagai anak buah kapal yang mendapatkan kepercayaan dari lembaga internasional dengan imbalan biaya pengiriman anak buah kapal yang sangat rendah. Mereka tersiksa karena pada akhirnya tidak memiliki pengetahuan dan keahlian, kata Tikno kepada Raja Eben Lumbanrau (Aspataki, 2020).

Biasanya, setelah meninggal, jenazah akan disimpan di lemari es dan dibawa kembali, namun jenazah ketiga ABK tersebut, menurut mereka, benar-benar dibuang ke air. Sebaliknya, Herman, komandan agen kru di Pemalang, Jawa

Tengah, menegaskan aspek lain dari tuduhan beberapa anak buah kapal tentang tuduhan penyiksaan di atas kapal perlu diperiksa. Pertimbangkan subjek jam kerja. Herman mengatakan, para pekerja kru sering bekerja secara bergiliran dan istirahat. Masalahnya adalah pekerja kru sering tidak memanfaatkan waktu istirahat mereka, yang mencegah mereka merasa segar untuk bekerja. Herman menyatakan bahwa minum air suling adalah tipikal di kapal Cina ketika datang ke persembahan. Terkait minimnya pemahaman bahasa yang ditengarai menjadi sumber gesekan, Herman mengatakan masakannya sangat lugas, sehingga ABK Indonesia mungkin belum terbiasa (BBC, 2020).

China ingin proaktif dan mengantisipasi kemajuan di masa depan, oleh karena itu pemerintah berupaya agar kredensial dan gelar Indonesia diakui di luar. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman juga mendorong kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, khususnya untuk saling menerima sertifikasi yang diterbitkan Indonesia. Dalam upaya mengamankan ABK saat bekerja di kapal asing, pemerintah mengirimkan perwira pelaut. Dia merasa pengiriman pelaut berpengalaman diperlukan untuk melindungi pelaut. Bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Kelautan dan Perikanan telah berkoordinasi. Mereka berencana untuk mulai melatih 1.000 polisi secepat mungkin tahun depan. Karena mengendalikan kapal adalah rencana kami jika kami ingin menjaga anak buah kapal, baik itu dinilai atau tidak (Aspataki, 2020).

Keselamatan anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing masih belum kuat. Anak buah kapal Indonesia masih sering dieksploitasi saat ini. Sebagian besar situasi ketenagakerjaan menampilkan anak buah kapal dari

Indonesia, menurut data Universitas Coventry dari 2016. 1.148 kasus, atau 48,4 persen, hadir. Kemudian kasus perdagangan manusia (12,1 persen atau 287 kasus), dan kasus penyelundupan manusia (35,1 persen atau 833 kasus). Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menangani 432 kejadian yang melibatkan ABK di laut pada tahun 2020, khususnya ABK kapal penangkap ikan asing, dan membantu pemulangan 22.553 ABK. Keluhan yang paling umum berpusat pada upah yang tidak benar atau diremehkan. Sejak November 2020 hingga Februari 2021, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) melakukan penelitian dan menemukan dokumen lain dengan informasi yang sebanding (Justice, 2022).

CEO IOJI, Achmad Santosa, memaparkan banyak perilaku ilegal dan tidak etis (HAM) yang terlihat di kapal penangkap ikan asing sebelum, selama, dan setelah ABK dipekerjakan. Perilaku ini masih ada sampai sekarang. Lima penyebab lain dari kurangnya perlindungan anak buah kapal ditemukan oleh Ota, yang semuanya berdasarkan penelitian IOJI. Kelima, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia belum memiliki peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang jenis-jenis perlindungan, duplikasi kewenangan dalam proses perekrutan dan penempatan, belum adanya database ABK yang terintegrasi, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap mereka yang melanggar hak asasi manusia dan pelaku kejahatan. Ota menyatakan dalam webinar "Menanyakan Komitmen Multi Pihak dalam Melindungi Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Perikanan Asing" bahwa tindakan perdagangan manusia (TPPO) yang melanggar hukum dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman anak buah kapal tentang hak-hak dasar terbukti tidak efektif (Justice, 2022).

Oleh karena itu, penundaan moratorium dilakukan untuk mengatasi permasalahan pelanggaran HAM, khususnya yang menyangkut perdagangan manusia. Dalam hal ini, ABK WNI yang bekerja di kapal asing China mengalami berbagai bentuk kekerasan dan perbudakan serta eksploitasi yang berlebihan terhadap TKI, khususnya ABK WNI. Indonesia.

BAB III

Konsep National Attributes and Foreign Policy Dalam Penundaan Moratorium Terhadap Kasus Yang Di Alami ABK Indonesia Di Kapal Asing Tiongkok

3.1. Ukuran Wilayah Negara Sebagai Dasar Penundaan Moratorium Terhadap Kasus ABK Indonesi DI Kapal Asing Tiongkok

Wilayah Laut China Selatan, laut yang berada di dekat Indonesia dan memiliki luas 2.974.615 km persegi, menjadi contoh eratnya hubungan antara China dan luas wilayah Indonesia. Hubungan tersebut ditunjukkan dengan berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan China dan Indonesia dalam menentukan batas negara. Tempatnya sendiri adalah pertemuan Samudera Pasifik dengan Selat Taiwan, antara Selat Malaka dan Selat Karimata. Laut Cina Selatan juga dikenal sebagai Laut Filipina Barat dan Laut Natuna Utara ketika berada di Indonesia. Taiwan, China, dan sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Brunei, semuanya memiliki saham kepemilikan di laut ini. Karena maraknya kasus perdagangan manusia, anak buah kapal Indonesia di kapal asing China telah menjadi korban beberapa kejahatan terhadap kemanusiaan (Firdaus, 2021).

Laut Cina Selatan menawarkan peluang untuk kolaborasi, terutama bagi negara-negara yang berbatasan dengan kepentingan di kawasan tersebut. Masih ada peluang untuk mendorong kolaborasi antara negara-negara ini dan bahkan antara negara-negara yang sekarang berkontribusi terhadap isu-isu di kawasan ini, Terlepas dari berlanjutnya konflik atau konfrontasi di Laut China Selatan yang

melibatkan China, Filipina, dan beberapa negara lainnya, termasuk Indonesia. Dalam presentasinya di Forum Geopolitik Jakarta ke-6, "*Geomaritime: Chasing the Future of Global Stability*," sarjana Rusia Dr. Alexander Korolev, Associate Professor dan Deputy Head of the Center for Comprehensive European and International Studies, Higher School of Economics, menggarisbawahi hal ini. . Terlepas dari semua persaingan kepentingan di Laut China Selatan, khususnya antara China dan Vietnam atau China dan Filipina, Alexander Korolev (24/8) menyatakan bahwa "kita dapat melihat bahwa masih ada ruang untuk kerja sama, terutama dalam isu keberlanjutan pembangunan di daerah." Negara-negara lain, seperti Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia, berpartisipasi dan melakukan perjalanan di sepanjang rute bilateral antara China dan Filipina (Pedrason, 2021).

Hal ini disampaikan dalam Forum Geopolitik Jakarta ke-6, "*Geomaritime: Chasing the Future of Global Stability*," oleh sarjana Rusia Alexander Korolev, Associate Professor dan Wakil Kepala Pusat Studi Komprehensif Eropa dan Internasional di Sekolah Tinggi Ekonomi. Pada 24 Agustus, Alexander Korolev mengatakan bahwa terlepas dari kepentingan yang saling bersaing di Laut China Selatan, khususnya antara China dan Filipina atau China dan Vietnam, masih ada peluang untuk bekerja sama. Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia adalah beberapa negara yang berkontribusi dan melintasi jalur bilateral China-Filipina. Karena China merupakan negara yang besar, maka luas Laut China Selatan yang langsung berhubungan dengan wilayah negara Indonesia, menimbulkan sengketa antara China dan Filipina yang menguntungkan Indonesia dengan membina kerjasama dengan China. Elemen ini secara signifikan mempengaruhi rute yang

akan diambil kebijakan untuk melindungi anak buah kapal. Indonesia akan membantu kapal asing China (Pedrason, 2021).

Maka demikian menurut Hudson bahwa Ukuran atau Ukuran wilayah suatu negara dapat berdampak pada tujuan dan metode pengambilan keputusannya. Misalnya, kebijakan luar negeri negara kecil dapat menemukan kerja sama dengan tetangga besar yang menarik. Tentu saja, kenetralan mungkin tampak lebih baik jika sebuah negara kecil terlibat dalam konflik antara dua negara besar. (Hudson, 2016) Hal ini lah yang terjadi pada negara china dan Indonesia, Indonesia dalam menghadapi permasalahan ABK kapal yang dikirim ke kapal China dengan langkah menunda atau melakukan kebijakan moratorium.

3.2. Sumber Daya Alam Sebagai Dasar Penundaan Moratorium Terhadap Kasus ABK Indonesi DI Kapal Asing Tiongkok

Setiap bangsa memiliki kepentingan nasional yang harus diupayakan dan dilindungi dengan segala cara yang ada. Untuk bernegosiasi secara efektif, Indonesia harus memiliki pengetahuan dan wawasan. Indonesia selain memanfaatkan kegiatan ASEAN juga melakukan diplomasi langsung dengan China terkait kerjasama yang telah dilakukan selama ini. China adalah pasar ekspor penting bagi Indonesia dan sumber investasi asing melalui sejumlah cara, termasuk program *One Belt, One Road* (OBOR), Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB), dan Perjanjian Perdagangan Bebas China-ASEAN (CAFTA). Akan tetapi AS harus tetap hadir di kawasan Asia-Pasifik sepanjang tidak termasuk perebutan supremasi dengan China dan justru bekerja untuk menjaga stabilitas kawasan (Sulistiyani, 2021).

Akibatnya, platform bilateral dan regional yang relevan harus digunakan untuk membina hubungan dengan mitra dagang utama Indonesia, termasuk AS dan China. Kemampuan Indonesia menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan menguntungkan perdagangan, keamanan nasional, dan kebijakan negara sebagai poros maritim dunia. Ini juga membantu meningkatkan stabilitas keamanan nasional. Pengawasan Perbatasan (Kepulauan Natuna) Meskipun tidak ada gesekan dalam hubungan antara Indonesia dan China atas klaim China atas zona ekonomi eksklusif di sekitar Kepulauan Natuna, kehati-hatian sangat diperlukan karena kondisi dan masalah yang dihadapi dunia yang semakin kompleks, ambigu, membingungkan, dan dinamis. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan RRT dengan kecaman yang lebih keras lagi, menyatakan bahwa "garis sembilan titik yang sejauh ini diklaim China dan menandai perbatasan maritimnya sama sekali tidak memiliki dasar hukum internasional" (L.Toruan, 2020).

Pemerintah harus mengambil pendekatan yang konsisten dan melakukan upaya berkelanjutan untuk menjaga kedaulatan. Selain itu, Indonesia dapat memanfaatkan sengketa Laut China Selatan untuk mempercepat pembuatan peta baru seputar Kepulauan Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Diperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi kuat secara formal dan legal dalam hukum internasional sebagai hasil dari peta baru ini. Demikian pula, kasus LTS menjadi motivasi bagi Indonesia untuk membuat peta baru yang melintasi batas negaranya tanpa melanggar kesepakatan dengan negara tetangga. Ia menawarkan kesepakatan tentang hubungan yang telah terjalin baik dalam pemanfaatan alam dan energi yang hingga kini telah terjalin lama dengan begitu banyak perusahaan asing asal China di daratan Indonesia. Konflik antara Indonesia dan China terutama

berupa perebutan sumber daya alam. sumber daya alam digunakan (Sulistiyani, 2021).

Oleh karena itu, tindakan harus diambil untuk mengeluarkan kebijakan moratorium dalam insiden anak buah kapal Indonesia di kapal Cina asing karena FMA mengkonsolidasikan organisasi melalui pembinaan kepada anggota, seperti meminimalkan penempatan pelaut non-prosedural, menyarankan larangan perekrutan, dan mengirim pelaut dan yang dicari oleh majikan di kapal. peringatan dari China kepada pemilik kapal yang menunda kapal dengan cara yang melampaui praktik internasional yang diterima. Transparansi adalah peluang yang dapat diterapkan di seluruh rantai pasokan personel penangkapan ikan dimulai dengan pekerjaan, menurut Wakil Direktur Stanford COS Elizabeth Selig, yang juga menyebutkan penegakan hukum, khususnya di sektor pembayaran kompensasi (Pedrason, 2021).

Sebab, kebanyakan kasus pel Importir, dealer, dan pengecer tuna top dunia berjanji pada Juni 2017 untuk mengakhiri semua jenis perbudakan dalam rantai pasokan perikanan tuna. Transparansi dapat membantu karyawan mempertahankan hak-hak mereka dengan memungkinkan mereka untuk lebih memahami klausul dalam kontrak dan melacak pencairan upah. Perusahaan yang membeli produk perikanan dapat mengawasi kondisi kerja anak buah kapal, pembayaran gaji, dan pelaksanaan kontrak untuk menjamin kepatuhan. Koordinator National Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Mohammad Abdi Suhufan, berpendapat bahwa ABK di kapal penangkap ikan asing harus benar-benar menyadari hak-hak mereka. Kurangnya pengetahuan tentang hukum dapat menyebabkan hak asasi anak buah kapal diabaikan. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak pekerja, DFW

memiliki berbagai inisiatif pendidikan, upaya sosialisasi, pelatihan terkait pengenalan risiko kerja, indikator kerja paksa, dan pembentukan kader di tingkat desa (Tansa, 2021).

Sama halnya dengan konsep Atribut Kebangsaan dan Politik Luar Negeri, sumber daya alam juga dapat berperan dalam politik luar negeri. Misalnya sumber energi yang dimiliki oleh negara kecil tetapi dibutuhkan oleh negara besar, hal inilah yang kemudian sumber daya alam memiliki peranan yang sangat penting, hal inilah yang kemudian dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan moratorium dalam pelaksanaannya untuk melindungi ABK Indonesia. dalam kasus perdagangan manusia yang kemudian perbudakan dan berbagai kejahatan manusia yang terjadi.

3.3. Geografi Sebagai Dasar Penundaan Moratorium Terhadap Kasus ABK Indonesi DI Kapal Asing Tiongkok

Letak wilayah Indonesia yang strategis berdampak pada berbagai faktor, mulai dari warisan budaya negara yang beragam hingga aktivitas ekonomi dan jalur perdagangan lintas batas. Lokasi Indonesia menawarkan keuntungan sebagai berikut (Haryanto, 2015).

1. Terletak di dekat jalan utama internasional

Dalam hal perdagangan dan pelayaran global, Indonesia berada di persimpangan jalan. Hal ini terlihat dari posisi geografis Indonesia yang dikelilingi oleh dua benua dan dua samudra yang menjadi jalur utama perdagangan. Antara perdagangan di negara maju dan berkembang, Indonesia berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi global, menurut situs Kementerian Luar Negeri. Di antara

negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa, misalnya, serta Jepang, Korea, dan China.

2. Menjadi negara maritim

Indonesia adalah negara maritim karena laut teritorialnya yang cukup besar. Hal ini terlihat dari letak geostrategis Indonesia yang didukung oleh data yang menunjukkan bahwa 40% arus perdagangan komoditas dan jasa diantarkan oleh kapal laut melalui laut Indonesia, termasuk 20% kebutuhan minyak melalui Selat Malaka, seperti dilansir detikEdu sebelumnya.

3. Memiliki keberagaman budaya.

Budaya dan peradaban yang berbeda dari negara lain telah mempengaruhi Indonesia. Karena lalu lintas jalur laut, Indonesia menjadi pelabuhan bagi banyak kapal internasional. Percampuran kelompok etnis dan budaya dihasilkan dari ini.

4. Memiliki banyak destinasi wisata alam

Fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan banyak tempat wisata alam adalah keuntungan lain dari posisi geografisnya. pantai, pegunungan, sungai, dan air terjun adalah titik awal. Jika dilihat dari keadaan geografis tersebut, sangat jelas bahwa keadaan geografis tersebut memperlihatkan bahwa potensi terhadap pengaruh geografis memberikan dorongan yang sangat kuat terhadap arah kebijakan luar negeri, dalam menjalin kerjasama dalam kancah internasional, sebagaimana hubungan yang dibangun antara Indonesia dan china dalam membangun kerjasama dalam dunia perikanan, dan lain – lain yang kemudian menguntungkan kedua negara tersebut. Berbagai adat dan tradisi bangsa lain telah melukai Indonesia. Indonesia telah lama menjadi hub bagi beberapa kapal

internasional. Lintas jalur laut. Dari sinilah terbentuk kelompok etnis dan budaya percampuran.

Fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan banyak tempat rekreasi luar ruangan bermula dari letak geografisnya. Empat unsur pertama adalah pantai, pegunungan, sungai, dan udara keruh. Dari perspektif geografis tersebut, terlihat potensi geografis yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kerjasama internasional di ranah politik dalam negeri serta meningkatnya hubungan antara Indonesia dan China di kawasan ini. Hal ini dapat diubah dengan menggunakan posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah sebagai keunggulan taktis ketika berhadapan dengan China. Menjadi middle power tergantung pada sejumlah faktor, antara lain kemampuan dan perilaku politiknya dalam hubungan internasional sebagai inisiator kegunaan nasional dalam mencapai stabilitas, keamanan, dan perdamaian di kawasan menuju arah politik luar negeri Indonesia terhadap China sehingga memiliki posisi negosiasi yang lebih kuat ketika mempertahankan kepentingannya terhadap China dalam menghadapi perbedaan kekuatan ini.

Memposisikan Indonesia sebagai negara dengan status kekuatan menengah mungkin menjadi langkah taktis kunci dalam menghadapi China untuk memperbaiki situasi ini. Keberadaan sebagai kekuatan menengah berdasarkan pada sejumlah indentifikasi yaitu kapasitas yang dimiliki dan perilaku politiknya dalam hubungan internasional sebagai inisiator penggunaan nasional dalam mewujudkan stabilitas/keamanan dan perdamaian di kawasan terhadap arah politik luar negeri Indonesia terhadap China sehingga lebih memiliki posisi tawar dalam

mempertahankan kepentingannya terhadap China di tengah-tengah ketidakseimbangan kekuatan tersebut (Hudson, 2016).

3.4. Sistem Politik Sebagai Dasar Penundaan Moratorium Terhadap Kasus ABK Indonesi DI Kapal Asing Tiongkok

Sistem politik, memberikan konsekuensi dalam bentuk arah kebijakan sebagaimana yang diungkapkan dalam gagasan Atribut Nasional dan Kebijakan Luar Negeri, Elemen penting lain dari geopolitik dalam lingkup geografis adalah kemampuan untuk mengontrol sumber daya. Banyak negara yang terkurung daratan telah menjadi mangsa tetangga pesisir mereka, yang karenanya dapat berdampak besar pada ekonomi mereka. Indonesia berupaya menerapkan larangan pengiriman ABK ke kapal China dengan berbagai alasan, yang terpenting adalah untuk menjaga dan memajukan kepentingan penduduk Indonesia. yang menjadi sasaran perlakuan sewenang-wenang oleh anak buah kapal di kapal China asing, arah sistem politik juga memengaruhi kepentingan mereka, itulah sebabnya perdamaian demokratis ada: Beberapa percaya bahwa keterbukaan demokratis mendorong lebih banyak empati di antara negara-negara demokratis (Hudson, 2016).

Jika dihadapkan pada negara yang bukan negara yang menganut sistem demokrasi seperti China dapat dikatakan bahwa kemungkinan konflik yang timbulkan akan besar, hal inilah yang digunakan Indonesia untuk mencoba menghindari konflik yang semakin besar untuk menarik atau menunda pengiriman ABK ke kapal asing China dengan mengeluarkan kebijakan moratorium. Indonesia dengan sistem demokratis juga akan susah menghadapi negara dengan sistem yang tidak menganut demokratis seperti China. Sistem demokratis yang menganut suatu

sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat akan menimbulkan beberapa dampak jika melawan negara seperti China yang sumber segala kebijakannya pasti berasal dari pihak pemerintahan. Indoensia mencegah adanya kegaduhan didalam negeri jika melawan China, hal ini akan berdampak terhadap warga negara Indonesia dalam berbagai aspek. Hal ini yang menjadi salah satu terjadinya penundaan moratorium pengiriman anak buah kapal, karena segala aspek harus dikaji oleh pemerintah Indonesia tidak hanya dari pemerintah saja (Yusuf, 2020).

3.5. Kemampuan Militer Sebagai Dasar Penundaan Moratorium Terhadap Kasus ABK Indonesi DI Kapal Asing Tiongkok

Kekuatan militer Indonesia menduduki peringkat ke-16 di dunia menurut Globalfirepower.com. Hingga 2019, Indonesia memiliki total 221 kapal dalam armada lautnya. Total ini termasuk 11 pangkalan perang laut, 139 kapal patroli, 5 kapal selam, 24 korvet, 8 fregat, dan 8 korvet hadir. Menurut statistik dari globalfirepower.com, Indonesia mengalami peningkatan jumlah kapal perusak dan kapal induk yang dapat melumpuhkan pesawat tempur (Bertrand Russell, 2023).

Logistik dan bahan bakar tidak diragukan lagi dibutuhkan untuk operasi militer. Terkait hal tersebut, Indonesia memiliki cadangan minyak sebesar 1,66 juta barel per hari. 3,23 miliar barel minyak sebagai cadangan. Terdapat 673 bandara dan 14 pelabuhan laut utama di Indonesia. Jika diperlukan, semua itu dapat digunakan untuk mendukung operasi militer.

Kekuatan Militer China menurut Globalfirepower.com menempatkan kekuatan militer China secara keseluruhan di urutan ketiga di dunia. Amerika

Serikat dan Rusia berada di bawah India dan Prancis. Armada angkatan laut China terdiri dari 714 kapal. terdiri dari 1 kapal induk, 52 fregat, 33 kapal perusak, 41 korvet, 76 kapal selam, dan 192 kapal patroli, 33 pangkalan laut juga aktif hadir. Jika pertempuran dilakukan di darat, China akan didukung oleh 13.000 tank, 40 kendaraan lapis baja, 2.000 roket proyektor, 4.000 artileri otomatis, dan 6.246 artileri manual. Angkatan udara China terdiri dari 1.222 pesawat tempur, 281 helikopter tempur, 1.000 helikopter, 1.564 pesawat pengebom, dan senjata antipesawat. Menambahkan 193 pesawat angkut (Bertrand Russell, 2023).

Ada 2,6 juta pasukan militer di China, 2,1 juta di antaranya bertugas aktif dan 510.000 cadangan. Sebanyak 621 juta orang siap berperang jika diperlukan. China memiliki sumber daya minyak 10 juta barel per hari, yang dapat digunakan untuk bahan bakar dan logistik. 25 miliar barel minyak berada di cadangan. 507 bandara dan 16 pelabuhan utama tersedia untuk digunakan pada masa perang di Cina. Militer China dan Indonesia bisa jadi lebih kuat dari yang terlihat di peta globalfirepower.com. Namun, setiap negara memiliki senjata tersembunyi yang digunakannya untuk melindungi pertahanan dan kedaulatannya.

Hal ini juga terkait dengan moratorium yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang sering dan sering terjadi hingga ranah pekerjaan yang dilakukan oleh TKI di kapal asing China dengan tujuan untuk melindungi WNI, jadi jika dilihat bahwa terdapat perbedaan kemampuan militer Indonesia dan militer China yang signifikan, yang dapat menentukan arah kebijakan Indonesia terhadap China, penting untuk diperhatikan. Akan tetapi pemerintah Indonesia masih sulit untuk melakukan moratorium dan lebih memilih untuk melakukan penundaan atas dasar kepemilikan militer yang masih belum dapat menyaingi

China, Indonesia masih membutuhkan juga armada serta bantuan militer yang dimiliki oleh China jika suatu saat terjadi konflik yang dihadapi oleh Indonesia. Jika moratorium dilakukan, Indonesia akan dihadapkan oleh dibatalkannya kerjasama militer yang telah disepakati dalam kedua negara. Tentu saja hal ini akan memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia karena akan susah jika memiliki konflik dengan negara lainnya tanpa memiliki bantuan yang berasal dari negara yang memiliki kekuatan militer yang besar seperti China.

3.6. Kemampuan Ekonomi Sebagai Dasar Penundaan Moratorium Terhadap Kasus ABK Indonesi DI Kapal Asing Tiongkok

Kesejahteraan warga negara berfungsi sebagai barometer kesehatan ekonomi negara tersebut dan sangat terkait dengan potensi ekonomi negara tersebut. Pemerintah dapat mempersiapkan penerimaan negara dan pembangunan ke depan dengan memahami laju pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pelaku sektor usaha dapat merencanakan pengembangan produk dan sumber dayanya berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Simon Kuznets (1971), pembangunan ekonomi terjadi ketika suatu negara mampu meningkatkan standar produksinya sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan pergeseran irasional saat ini. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai peningkatan pendapatan berdasarkan sejumlah ukuran, termasuk peningkatan pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah pekerja yang lebih banyak daripada jumlah pengangguran, dan penurunan tingkat kemiskinan. nilai dan volume produk dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama periode waktu tertentu (Bruchey, 2020).

Setiap daerah atau bangsa memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang berbeda dan tidak merata. Ketidaksetaraan dalam kepemilikan berbagai sumber daya lintas negara adalah penyebab umum ketidaksetaraan dalam pertumbuhan ekonomi antar negara. Dimana penciptaan modal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mempercepat proses pembangunan. Karena hubungan yang erat antara kemajuan teknis dan perubahan proses produksi, transformasi teknologi merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan ruang dan waktu akan dihilangkan, sehingga muncul sektor-sektor baru yang memanfaatkan kemajuan teknologi (Bruchey, 2020).

Akuisisi teknologi, menurut Komisariss Utama Garuda Indonesia Jusman Syafii Djamil, akan menumbuhkan kreativitas dan inovasi tetapi juga menghasilkan perubahan struktural dan ketidakstabilan dalam kehidupan sehari-hari karena mencakup barang baru, investasi, keuntungan, rantai pasokan, dan prosedur pasar. Ia menambahkan, dua paradigma yang akan diikuti oleh China dan Indonesia akan muncul dari sini. China menggunakan struktur “market driven” yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sedangkan Indonesia menganut pola “technology driven” yang diterapkan secara bertahap (Simangunsong, 2021).

China dan Indonesia awalnya memiliki fokus yang sama dalam menciptakan teknologi unggulannya. Namun, "cara Indonesia" dan "cara China" benar-benar berbeda dalam hal perjalanan dan kebijakan yang dipilih. Ketika Deng Xiao Ping berkuasa di China, negara tersebut mulai mengembangkan teknologinya. Dia memutuskan untuk membangun negara perkotaan (metropolitan), tetapi dia juga menambahkan kawasan khusus yang terintegrasi seperti kawasan industri,

kawasan komersial, kawasan pemukiman, dan sektor pariwisata, di mana kebutuhan pasar dan teknologi dapat bertabrakan. Cina segera menguasai daerah-daerah tertentu seperti Guandong, Shenzhen, dan Fujian, mengubahnya menjadi daerah berorientasi ekspor. Wilayah ini menawarkan kemampuan beradaptasi dengan permintaan pasar. Aturan dan prosedur pasar digunakan untuk melakukan proses mendapatkan teknologi mutakhir (Simangunsong, 2021).

Sementara itu, Indonesia mulai memperoleh teknologi mutakhir dengan membangun pabrik perakitan elektronik langsung bermitra dengan perusahaan internasional agar hasilnya dapat dirasakan. Baru setelah itu periode pertumbuhan industri penerbangan Bandung berlanjut. Ekonomi bergerak sebagai hasil dari kemajuan teknis suatu negara. Jika dulu perdagangan barang dilakukan secara fisik, kini juga dilakukan melalui sarana teknis. Pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung akan dipengaruhi oleh migrasi ekonomi berikutnya.

Kemajuan teknologi membantu mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong pembangunan ekonomi dengan cara yang lebih positif di tingkat ekonomi makro. Kemajuan teknologi informasi secara halus juga akan meningkatkan kemampuan suatu bangsa untuk bersaing dalam proses memajukan perekonomiannya. Oleh karena itu, bisnisnya dapat meningkatkan PDB negara, yang selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Akibatnya, kemajuan teknis akan mendorong produktivitas modal, sumber daya manusia (SDM), dan elemen produksi lainnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan keberhasilan suatu bangsa. Pertumbuhan ekonomi harus diprioritaskan dan kemudian ditingkatkan secara konsisten karena ini menunjukkan seberapa baik kinerja pemerintah dan pegawainya dalam membina kehidupan yang

sukses dan bekerja untuk kondisi yang terkadang lebih besar dan sejahtera bagi warganya.

Pertumbuhan ekonomi berfungsi baik sebagai contoh dan ukuran penting dari negara suatu bangsa, yang dengan demikian terkait erat dengan kesejahteraan dan kemakmuran warganya. Kita dapat memperoleh pemahaman tentang keadaan umum bangsa dan menggunakannya sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan keputusan yang tepat dan berhasil dengan membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi China dan Indonesia.

Pola ketergantungan yang muncul dan saling ketergantungan ekonomi yang harus dilacak untuk memahami dampak kekuatan ekonomi terhadap kebijakan luar negeri dan pengembangan kapasitas tersebut. Indikator-indikator tersebut di atas menunjukkan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menyusun rencana pelaksanaan politik luar negeri yang dapat menguntungkan baik Indonesia maupun hubungan internasional lainnya yang ada. Hal tersebut terjadi pada hubungan Indonesia dan China sebagai akibat dari beberapa kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dan China untuk memperkuat dan meningkatkan perekonomian dengan melakukan kerjasama antara negara berkembang dengan negara maju seperti China sehingga tercipta berbagai kerjasama, salah satunya yaitu dengan mengeluarkan kebijakan moratorium pengiriman ABK WNI ke kapal asing China. Intinya, ini didasarkan pada kemajuan ekonomi, tetapi berakhir dengan kejahatan terhadap kemanusiaan karena melanggar hak-hak rakyat.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penundaan atau penangguhan. bahwa moratorium merupakan bentuk tindakan dari pemerintah untuk melakukan penundaan. mirip dengan bagaimana kekuasaan pemerintah berasal dari landasan hukum UU 30/2014. Setiap lembaga yang menangani urusan pemerintah diharuskan untuk bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan aturan yang relevan. Banyak orang menemukan bahwa masih banyak kapal penangkap ikan asing yang melakukan kegiatan yang melanggar hukum dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebelum, selama, dan setelah merekrut anak buah kapal. Lima penyebab lain yang mendasari kurangnya perlindungan ABK Indonesia juga ditemukan oleh Ota, yang semuanya berdasarkan penelitian IOJI. Kelima, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia belum memiliki peraturan pelaksanaan yang mengatur jenis-jenis perlindungan, duplikasi kewenangan dalam proses perekrutan dan penempatan, belum adanya database ABK yang komprehensif, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar HAM dan penjahat. Pada masa kepresidenan Jokowi, pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium untuk melindungi warganya.

Terdapat 6 indikator dalam Konsep National Attributes and Foreign Policy Dalam penundaan moratorium terhadap kasus Yang Di Alami ABK Indonesia di kapal asing China, yang mana ke enam indicator tersebut sangat berpengaruh pada arah kebijakan dan politik luar negeri antara Indonesia dan China, pengaruh yang

digagas oleh teori Valerie M. Hudson, menjadikan dasar diterbitnya moratorium atas pengiriman ABK Indonesia di kapal asing China.

4.2. Saran

Adapun saran yang diberikan kepada penilitan yang akan datang untuk mengembangkan dan memperbaiki penilitian mengenai :

1. Penilitian selanjutnya dapat melanjutkan penilitian sekarang dengan penilitian serupa dengan penundaan moratorium pengiriman TKI ke China dalam rangka mengatasi perdagangan ABK oleh pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan jokowi 2017-2021 dengan menggunakan dihadapkan pada prespektif HAM.
2. Peniliti selanjutnya dapat melakukan pengukuran terhadap kajian moratorium dengan menitikberatkan pada aspek hak asasi manusia yang diberlakukan kepada para TKI yang dikirim ke kapal asing China
3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan konsep kebijakan luar negeri politik luar negeri dengan landasan idiil, konstitusional, dan operasional. dengan kasus yang sama dengan tambahan ruang konsep seperti Equal dengan pendekatan Hak Asasi Manusia serta lainnya yang belum termuat dalam penilitian ini.
4. Peneliti selanjutnya dapat melakukan pengumpulan data yang lebih komprehensif dan cermat terhadap penundaan moratorium pengiriman TKI ke China dalam rangka mengatasi perdagangan ABK oleh pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan jokowi (2017-2021) dan mengungkapkan kasus – kasus atas yang belum dijelaskan pada penilitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahnaf Tsaqif Firdaus. (2021). HUBUNGAN INDONESIA DENGAN CHINA DALAM MENINGKATKAN HUBUNGAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA ERA JOKOWI PERIODE I. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(1), 1.
- Ajib Rakhmawanto. (2019). KEBIJAKAN MORATORIUM DAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 5(2), 63–74.
- Andryan, F. W. dan. (2022). *Hukum dan Kebijakan Publik*,. Sinar Grafika.
- Anjani, F. S. (2022). Implementasi Hukum Terhadap Eksploitasi ABK Indonesia di Kapal China Berdasarkan Maritime Labour Convention 2006. *Jurnal Maritim*, 1(1), 1. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/13/133627865/kenestapaan-abk->
- Aspataki. (2020). IFMA SELENGGARAKAN BIMTEK CREWING MANAGEMENT. *Aspataki Channel*, 1.
- BBC. (2020). ABK Indonesia di kapal China: Indonesia minta Beijing selidiki dan desak perusahaan kapal penuh tanggung jawab pada para awak. *BBC.Com*, 1.
- Bertrand Russell. (2021, June). “War does not determine who is right - only who is left.” <https://www.globalfirepower.com/>, 1.
- Bertrand Russell. (2023). GLOBAL FIREPOWER 2023 “War does not determine who is right - only who is left.” *Globalfirepower.Com*, 1.
- Bruchey, S. (2020). Association Notes. *The Journal of Economic History*, 45(4), 972–973. <https://doi.org/10.1017/S0022050700035233>
- Chaterine, R. N. (2020, Juni 10). *Detik*. Retrieved from Detik.com.
- Wiyoga, P. (2020, Juni 8). *Kompas*. Retrieved from Kompas.id.
- Destructive Fishing Watch Indonesia. (2021). DFW in Tuna Talks 2023: Spurs

- Impactful Collaboration for Welfare and Rights for Fishers and Workers in Indonesia's Seafood Industry. *Https://Dfw.or.Id/Dfw-In*, 1.
- Erman Suparno. (2019). Kebijakan dan Strategi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. In *Sekretariat Negara Republik Indonesia* (Vol. 1, Issue 1, p. 13).
- Haryanto, A. (2015). Faktor Geografis dan Konsepsi Peran Nasional sebagai Sumber Politik Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.18196/hi.2015.0074.136-147>
- Hudson, V. M. (2016). Foreign Policy Analysis Classic and Contemporary Theory. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (ke 2, Vol. 6, Issue August). ROWMAN & LITTLEFIELD.
- International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995, 1 (2021).
- Justice, I. O. (2022). Protect Effectively Produce Sustainably Prosper Equitably. *Oceanjusticeinitiative.Org*, 1.
- L.Toruan, G. T. (2020). Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 111–129. <https://doi.org/10.31599/jkn.v6i1.449>
- Matondang, E. (2021). Proyeksi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Era Pemerintahan Biden Dan Implikasinya Terhadap Diplomasi Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 11(3), 119. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v11i3.1437>
- Owo. (2023). ndonesia"TiongkokTanda Tangani Perjanjian BETC - Babak Baru Peningkatan Kerja Sama Bilateral. *Neraca.Co.Id*, 1.
- Pedrason, R. (2021). Indo-Pasifik dalam perspektif geopolitik dan geostrategi. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(1), 88–95.

<https://doi.org/10.29210/02021830>

Simangunsong, J. (2021). Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi China vs Indonesia.

Kumparan.Com, 1.

Sulistiyani. (2021). Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo Indonesia. *Jurnal Politica*, 12(1), 85–103.

<https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.2149>

Tansa. (2021). Kerja Sampai Mati: Siksaan terhadap ABK Indonesia di Kapal Tuna Tiongkok. *Mongabay.Co.Id*, 1.

United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, United Nations Treaty Collection 1 (2000).

Ahriani, J. W. (2021). Tanggung jawab Negara Bendera Kapal Terhadap Perbudakan ABK. *Jurnal Ilmu Hukum*, 53-55.

Fitrah, E.(2015). Gagasan HumanSecurity dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. *Insignia*, 1-14.

Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing. Iniative, Indonesia Ocean Justice. (2020). *Indonesia Ocean Justice Iniative*. Jakarta: Indonesia Ocean Justice Iniative.

Olii, M. D. (2017). Perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 39-51.

Prisnasari, I. (2019). Modern Slavery Pada Anak Buah Kapal (Abk) Perikanan Dalam. *Jurist-Diction*.

Snyder, R. C. (1962). *Foreign Policy Decision-Making: An Approach to the Study of International Politics*. New York: Glencoe.

Surianto, D. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM ABK INDONESIA DI KAPAL ASING DALAM. *Jurnal Hukum Adigama*.

Wiyoga, P. (2020, Juni 8). Lagi, Pekerja migram di kapal China lompat ke laut. *Kompas*. Retrieved from Kompas.id.

Yusuf, Z. (2020, Agustus 28). *Demokrasi yang Tak Sempurna*.